AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK OLEH KONSUMEN DI PERCETAKAN MITRA JAYA LESTARI DI PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan oleh:
Monika Anggraini
NIM: A1011201080

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK OLEH KONSUMEN DI PERCETAKAN MITRA JAYA LESTARI DI PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Monika Anggraini
NIM. A1011201080

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah ,S.H,. M.H	**Lolita, S.H.,M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291999022001

Tanggal Lulus : 13 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H NIP. 196909231996011001	Pembina Tingkat I / IV b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, S.H.,MH NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H.,M.H NIP. 196909301996032001	Pembina Tingkat I / III d	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2597/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika Anggraini

NIM : A1011201080

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjumgpura

Judul Skripsi : "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK OLEH KONSUMEN DI PERCETAKAN MITRA JAYA LESTARI DI PONTIANAK."

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan-alhan tulisan atau buah pikiran milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 13 Juli 2026

Monika Anggraini

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, berkat petunjuk dan bimbingan yang telah dianugerahkan-Nya, penulis akhirnya dapat merampungkan penulisan karya ilmiah skripsi ini yang mengangkat judul "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK OLEH KONSUMEN DI PERCETAKAN MITRA JAYA LESTARI DI PONTIANAK" dengan baik dan tepat waktu. Pengajuan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memeroleh gelar Sarjana Hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Sejalan dengan hakikat manusia oleh Aristotles, sebagai *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, penulis menyadari bahwa rampungnya karya ini murni berkat limpahan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan fasilitas, literatur, dan kenyamanan lingkungan kampus bagi seluruh mahasiswa.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan jajarannya atas segala kemudahan

administratif, pelayanan akademik, dan kesempatan belajar yang luar biasa di instansi ini.

3. Prof. Dr. Kamarullah, S.H.M.,Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.M.H selaku dosen Pembimbing I yang tidak pernah mengenal lelah dalam mengarahkan, mengoreksi, serta menyumbangkan ide-ide brilian yang memperkaya substansi skripsi penulis.
5. Ibu Lolita, S.H.M.H selaku dosen Pembimbing II yang dengan keikhlasan dan profesionalismenya telah memberikan bimbingan teknis maupun konseptual sehingga penyusunan karya ilmiah ini dapat berjalan lancar.
6. Ibu Chandra Maharani S.H.M.H, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Angga Prihatin, S.H.M.H, selaku Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang yang telah dengan tulus ikhlas mencurahkan ilmu, wawasan, serta bimbingan akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan hingga selesai.
9. Seluruh jajaran staf administrasi dan karyawan yang bertugas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala bantuan pelayanan akademik, kemudahan birokrasi, serta dukungan penuh yang diberikan selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Percetakan Mitra Jaya Lestari dan Gerai Laundry yang bermurah hari telah memberikan kemudahan berupa perizinan, kesediaan data esesnsial dan informasi lapangan untuk peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pontianak, 13 Juli 2026

Monika Anggraini
A1011201080

ABSTRAK

Perjanjian pemesanan spanduk antara percetakan dan konsumen yang dilakukan secara lisan tetap menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Permasalahan muncul ketika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen setelah spanduk selesai di cetak, yang membuat pihak percetakan mengalami kerugian. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemberlakuan regulasi pelindung hak-hak pelaku usaha percetakan menjadi krusial demi menciptakan jaminan kepastian hukum sekaligus rasa tenteram dalam transaksi kontraktual yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Penelitian ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan memadukan sudut pandang perundang-undangan dan realitas sosial di lapangan. Informasi yang dihimpun terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer/utama dari sesi tanya jawab bersama subjek penelitian serta data sekunder/pendukung dari dokumen perundang-undangan. Seluruh fakta dan bahan pustaka tersebut dikumpulkan lewat kegiatan observasi langsung dan kajian literatur, lalu dievaluasi secara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis, keputusan sebelah pihak dari pelanggan untuk membatalkan transaksi setelah spanduk tuntas dicetak diklasifikasikan sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi. Penelitian ini juga menunjukan bahwa tindakan pembatalan sepihak bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian. Percetakan menetapkan ketentuan hangusnya uang muka sebagai bentuk perlindungan usaha, namun ketentuan tersebut seringkali menimbulkan perdebatan ketika konsumen tidak memahami konsekuensi hukum perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Pembatalan sepihak, perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, percetakan spanduk.*

ABSTRACT

A verbal agreement between a printing company and a customer regarding a banner order still has legal consequences for the parties involved. Problems arise when a consumer unilaterally cancels an order after the banners have been printed, causing the printing company to incur losses. To address this issue, the implementation of regulations protecting the rights of printing businesses is crucial to ensuring legal certainty and a sense of security in contractual transactions mutually agreed upon by both parties.

This study relies on an empirical legal research method by combining perspectives from legislation and social realities in the field. The information gathered is divided into two categories: primary data from interviews with research subjects and secondary data from legal documents. All facts and literature were collected through direct observation and literature review, then evaluated using descriptive qualitative analysis.

Based on the results of the analysis, a customer's unilateral decision to cancel a transaction after the banner has been printed is classified as a breach of contract, which carries legal consequences in the form of liability for damages. This study also shows that unilateral cancellation is contrary to the principles of contract law. The printing company make provision forfeiting down payment as a form of business protection, but this provision often causes debate when consumers do not understand the legal consequences of the agreed contract.

Keywords: *Unilateral cancellation, agreement, breach of contract, compensation, banner printing.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 9
E. Keaslian Penelitian 9
F. Hipotesis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perjanjian Pemesanan 19
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemesanan 29
C. Akibat Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemesanan 32
D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Percetakan Bagi Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemesanan Spanduk 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
1. Jenis Penelitian 42
2. Sifat Penelitian 43
B. Jenis Data 44
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 45
1. Tenik dan Pengumpulan Data 45
2. Populasi dan Sampel 47

D. Analisis Data 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Analisis Data 51
B. Pembuktian Hipotesis 60
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 66
A. Buku 66
B. Dokumen Hukum 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Permohonan Pengantar Penelitian Skripsi Peretakan Mitra Jaya Lestari

Lampiran II. Permohonan Pengantar Penelitian Skripsi Gerai Laundry

Lampiran III. Surat Keterangan Wawancara Percetakan Mitra Jaya Lestari

Lampiran IV. Surat Keterangan Wawancara Gerai Laundry

Lampiran V. Hasil Wawancara Percetakan Mitra Jaya Lestari

Lampiran VI. Hasil Wawancara Gerai Laundry

Lampiran VII. Dokumentasi di Percetakan Mitra Jaya Lestari

Lampiran VIII. Dokumentasi di Gerai Laundry

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan manusia dalam dinamika bisnis tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jasmani, melainkan membutuhkan komunikasi konstruktif, hubungan timbal balik yang menguntungkan (mutualisme), manifestasi keadilan distributif dan komitmen menghindari kerugian timbal balik demi terpeliharanya ketertiban hukum dan tatanan kehidupan dalam masyarakat.[1]

Pada era modern saat ini, istilah pesan atau memesan sudah tidak asing bagi semua orang. Praktik transaksi pemesanan menduduki posisi sentral dalam rutinitas harian manusia. Dari sudut pandang hukum perdata, kesepakatan jual beli barang lahir melalui konsensus yang terjalin secara sah di antara pihak pelaku usaha selaku penyedia dan konsumen sebagai pembeli.[2]

Berdasarkan perspektif ilmu hukum, definisi perjanjian dapat dikaji melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata,yang termaktub dalam buku ketiga tentang hukum perikatan Bab kesatu, Pasal 1313 berbunyi,

---

[1] Idri dan Titik Triwulandari Putri. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta*: Lintas Pustaka, hlm 1.

[2] Salim H.S.2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta*:* Sinar Grafika, hlm 49.

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang ataulebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih."[3]

Perjanjian pemesanan barang termasuk dalam perjanjian konsensual, artinya kesepakatan menjadi dasar pembentukan perjanjian. Tidak diperlukan penyerahan barang secara langsung pada saat kesepakatan dibuat. Berdasarkan asas konsensualisme, perikatan hukum sah mengikat penjual dan pembeli manakala terjadi persesuaian kehendak terkait barang yang dipesan dan besaran harga yang disepakati.[4]

Tujuan utama dari konsensus yang terjalin adalah menerbitkan seperangkat otoritas dan beban kewajiban hukum sehingga manakala terjadi pelanggaran terhadap butir-butir persetujuan akan berakibat pada penjatuhan konsekuensi serta sanksi tegas kepada pihak yang melanggar.[5]

Salah satu usaha yang sering menggunakan sistem pemesanan dan pembayaran uang muka (DP) adalah usaha percetakan. Bisnis percetakan di tanah air merupakan salah satu sektor komersial yang tidak pernah lekang oleh waktu. Transformasi era digital saat ini mendorong ekspansi usaha tersebut secara signifikan, terbukti dari semakin tingginya tingkat pemanfaatan mesin cetak berbasis digital serta *offset* di berbagai badan usaha penyedia jasa.

---

[3] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 338.
[4] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. *Jual Beli, Cet.2, Ed. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 82.
[5] Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta: Intermasa,* hlm 97.

Laju pertumbuhan industri percetakan berlangsung secara masif karena ditopang oleh tingginya tuntutan para konsumen. Usaha percetakan merupakan salah satu jenis usaha jasa yang banyak diminati masyarakat karena kebutuhan promosi dan informasi visual yang terus meningkat. Dalam praktiknya, pemesanan spanduk biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan pihak percetakan, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi pembatalan sepihak oleh pemesan, bahkan setelah desain disetujui atau proses pencetakan dimulai.

Percetakan Mitra Jaya Lestari yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura, Gang Meliau, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan yang dimiliki Bapak Gunawan merupakan salah satu usaha jasa percetakan yang melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembuatan spanduk, banner, dan media promosi lainnya. Percetakan ini menerima lebih dari 10 pesanan spanduk tiap bulannya, baik untuk acara personal, kegiatan bisnis, maupun keperluan institusi. Aktivitas produksi yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa jasa spanduk masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari.

Di samping tingginya jumlah pemesanan, dalam kurun waktu 1 tahun mereka bisa mendapatkan konsumen yag membatalkan pesanan mereka walaupun jumlahnya relatif kecil, yaitu kurang dari 5 kasus dalam setahun. Meskipun jumlahnya sedikit, pembatalan tersebut tetap menjadi

persoalan penting karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak percetakan yang telah mengeluarkan biaya bahan, tenaga kerja, dan waktu produksi.

Percetakan Mitra Jaya Lestari sendiri memiliki ketentuan internal terkait pembatalan, yaitu bahwa uang muka (DP) konsumen yang membatalkan pesanan akan hangus sebagai bentuk kompensasi terhadap biaya awal pengerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak percetakan. Ketentuan ini disampaikan kepada konsumen pada saat pemesanan, meskipun tidak tertulis, dan telah menjadi kebiasaan usaha *(business practice)* di percetakan tersebut. Adapun harga spanduk di percetakan Mitra Jaya Lestari adalah Rp 25.000 per meter, dengan sistem pembayaran menggunakan DP dan waktu pengerjaan normal sekitar 3 ampai 4 hari tergantung tingkat kerumitan desain.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada percetakan Mita Jaya Lestari, peneliti mendapatkan identitas konsumen yang membatalkan pesanan spanduknya pada percetakan ini. Konsumen yang merupakan sebuah tempat laundry bernama Gerai Laundry yang dimiliki oleh Ibu Asmawati. Gerai Laundry yang merupakan usaha dalam bidang jasa dan berlokasi di Jalan Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Dalam menjalankan usahanya, Gerai Laundry menjalin hubungan hukum dengan Percetakan Mitra Jaya Lestari melalui suatu perjanjian pemesanan spanduk. Namun, realitas pelaksanaan transaksi kerap kali diwarnai oleh

pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengelola Gerai Laundry sesudah tahap pencetakan spanduk tuntas dikerjakan.

Pada perjanjian pemesanan antara pemilik percetakan dengan konsumen dalam pemsanan spanduk dapat melahirkan suatu pertalian yuridis. Pertalian tersebut secara rinci dan tegas menetapkan batasan wewenang serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Contoh halnya ialah kewajiban pemilik percetakan untuk menyediakan jasa kepada konsuen yang memesan barang dalam kurun waktu yang telahditentukan dan pihak konsumen juga harus melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati sejak awal.

Dalam perjanjian pemesanan ini, setelah pengerjaan spanduk telah diselesaikan pihak percetakan, ternyata pihak konsumen ingin merevisi isi dalam spanduk karena ada kesalahan tanggal promosi laundry di dalam spanduk yang diakibatkan oleh kelalaian pihak laundry. Dan pihak laundry tidak ingin membayar sisa pembayaran dengan dalih akan memesan spanduk baru dan membayar penuh biaya yang ditetapkan tanpa melakukan pembayaran uang muka (DP) seperti sebelumnya.

Perubahan ini tidak diizinkan oleh pihak percetakan dan pihak konsumen diminta untuk mengganti kerugian spanduk yang telah dicetak terlebih dahulu. Jadi dapat dipastikan pihak Gerai Laundry milik Ibu Asmawati yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya melakukan

cidera janji atau wanprestasi kepada pihak Percetakan Mitra Jaya Lestari milik Bapak Gunawan.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi di lapangan, alasan pembatalan pesanan yang terjadi adalah kesalahan penyesuaian desain, seperti ukuran atau isi yang dianggap tidak sesuai atau perubahan mendadak yang tidak dikomunikasikan secara jelas kepada pihak percetakan. Karena pembatalan sepihak inilah yang membuat pihak percetakan mengalami kerugian nyata dan hilangnya keuntungan bagi percetakan, termasuk biaya bahan yang telah dikeluarkan, tenaga kerja, serta hilangnya keuntungan pada pemesanan.

Dalam perjanjian terkadang tidak berjalan dengan lancar bahkan dapat batal karena adanya wanprestasi. Menurut pandangan pakar hukum Abdulkadir Muhammad dalam buku "Hukum Perdata Indonesia", inti dari perbuatan wanprestasi adalah ketidakpatuhan atau kelalaian seseorang dalam menuntaskan tanggung jawab yang telah disepakati bersama melalui ikatan perjanjian.[6] Walaupun telah diikat oleh kesepakatan, suatu perjanjian antarpihak tidak selamanya dapat direalisasikan secara mulus sesuai dengan harapan serta tujuan yang ingin dicapai sejak awal. Dalam situasi tertentu, suatu kesepakatan kontraktual dapat gugur atau dibatalkan,

[6] Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 241.

baik atas kehendak para pihak atau melalui intervensi perintah pengadilan yang sah.[7]

Menilik dari berbagai persoalan hukum yang telah diuraikan di atas, ketertarikan akademis muncul untuk meneliti isu tersebut secara komprehensif ke dalam riset skripsi dengan mengangkat judul **"Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pemesanan Spanduk Oleh Konsumen Di Percetakan Mitra Jaya Lestari"**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian kontekstual yang telah dipaparkan sebelumnya, batasan serta fokus utama penulisan riset hukum ini dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pemesan Spanduk Yang Telah Membatalkan Secara Sepihak Pesanannya Terhadap Percetakan Mitra Jaya Lestari Di Jalan Tanjung Pura, Gang Meliau, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, esensi tujuan operasional yang ingin diwujudkan dari penulisan karya ilmiah ini antara lain:

---

[7] Supriadi. 2006. *etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.12.

1. Untuk mencari data dan informasi tentang perjanjian jasa pemesanan spanduk antara Percetakan Mitra Jaya Lestari sebagai produsen dan Gerai Laundry sebagai konsumen
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian pemesanan spanduk yang dilakukan konsumen dari Gerai Landry terhadap Percetakan Mitra Jaya Lestari.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak konsumen dari Gerai Laundry terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan dalam perjanjian pemesanan spanduk terhadap Percetakan Mitra Jaya Lestari.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum dari pihak Percetakan Mitra Jaya Lestari kepada pihak konsumen Gerai Laundry dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian pemesanan spanduk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan serta literasi hukum terkait mekanisme pengadaan perjanjian pemesanan di tengah masyarakat.

b. Penelitian ini dapat menawarkan sumbangsih referensi bagi pengayaan khazanah ilmu pengetahuan berkat penerapan metode analisis yang objektif.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik percetakan yang membuat pesanan spanduk dan konsumen yang memesan spanduk terkait batas kewenangan serta tanggung jawab masing-masing, demi terwujudnya iklim transaksi yang menjamin kepastian hukum.

b. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber literasi yang edukatif bagi masyarakat umum serta kalangan pembaca yang mendalami aspek hukum kontrak pengadaan spanduk.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian karya ilmiah ini dibuktikan dengan menelaah sejumlah penelitian lampau yang memiliki irisan topik pembahasan. Meskipun terdapat perbedaan pada aspek karakteristik subjek, kuantitas variabel, atau teknik pengolahan datanya, perbandingan tersebut esensial untuk mengidentifikasi temuan-temuan substantif yang telah dihasilkan oleh peneliti terdahulu.

Lebih lanjut, perbandingan tersebut bertujuan untuk mempertegas batas kebaruan (*novelty*) riset ini, khususnya pada aspek karakteristik objek serta wilayah studi yang diambil. Kehadiran kajian pustaka ini juga esensial guna menggali kerangka teoretis yang berkesesuaian langsung dengan fokus permasalahan di dalam judul skripsi.

Tulisan penulis yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pemesanan Spanduk Oleh Konsumen Di Percetakan Mitra Jaya Lestari Di Pontianak”, merupakan karya yang ditulis asli oleh penulis, bukan tlisan yang merupakan plagiasi. Melalui serangkaian penelaahan literatur yang telah ditempuh, ditemukan sejumlah judul riset terdahulu yang menunjukkan relevansi topik dengan penelitian ini, yang dipublikasikan atau disusun oleh:

1. **Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Motor Dengan Sistem Indent Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian (Studi Penelitian Dealer Honda Pati).**

   Jurnal ditulis oleh: Fikri Alim, Karimatul Khasanah

   Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid

   Esensi dasar penyusunan riset ini bermula dari mekanisme operasional pada dealer Honda Pati yang menerapkan kebijakan pembayaran uang panjar atau DP bagi para pembeli. Mekanisme transaksi tersebut mewajibkan penyerahan uang muka di awal, sementara sisa pelunasan, baik secara kontan maupun pembiayaan kredit baru dilaksanakan manakala barang telah diserahkan.

   Persoalan hukum timbul ketika konsumen melakukan pemesanan kendaraan melalui sistem *indent* dengan menyerahkan sejumlah uang muka serta menyepakati jadwal kedatangan barang. Apabila terjadi pembatalan transaksi oleh pihak pembeli, maka

konsekuensinya dana panjar tersebut tidak dapat ditarik kembali, merujuk pada ketentuan norma Pasal 1464 KUHPerdata.

Jenis penelitian ini tergolong sebagai riset empiris atau lapangan (*field research*), yang fokus utamanya adalah membedah dan mengkaji secara komparatif antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta praktis yang terjadi pada realitas sosial masyarakat, dengan menerapkan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif difungsikan untuk menyelami pengalaman empiris subjek penelitian yang dituangkan melalui deskripsi naratif berbentuk kata-kata dan berbasis kebahasaan. Rangkaian kegiatannya dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pemetaan masalah, hingga tahap penyelesaian kasus. Adapun fokus spesifik yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah dinamika transaksi jual beli sepeda motor melalui sistem *indent* di dealer Honda Pati.

Persamaan mendasar antara jurnal pembanding dan skripsi ini bermuara pada isu sentral yang dibahas, yakni tindakan pembatalan transaksi secara sepihak oleh pelanggan, serta kesamaan instrumen metodologi berupa pendekatan kualitatif yang bersifat empiris.

Sedangkan pembeda utama di antara jurnal dengan skripsi penulis tampak pada kompartemen objek riset, di mana karya terdahulu membedah kasus pembelian motor di dealer Honda Pati, sementara

penelitian ini memfokuskan telaahnya pada layanan percetakan spanduk di Mitra Jaya Lestari.

2. **Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Oleh Konsumen Di Pt. Restu Property.**

   Jurnal ditulis oleh: Rama Prawira, Wayan Novy Purwanto

   Universitas Udayana

   Latar belakang penyusunan jurnal ini bertumpu oleh lonjakan harga lahan serta bahan bangunan dari waktu ke waktu memicu tingginya beban finansial dalam sektor perumahan, yang berdampak langsung pada kesulitan masyarakat untuk memperoleh hunian. Guna menyikapi kendala tersebut, pengadaan tempat tinggal melalui skema pembiayaan pemilikan rumah secara kredit, yang lazim disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), muncul sebagai alternatif solusi penyelesaian yang rasional dan terjangkau.

   Praktik transaksi perumahan dengan memanfaatkan skema pembiayaan KPR banyak diterapkan oleh kalangan pengembang (*Developer*) guna memasarkan dan menawarkan sejumlah unit properti kepada calon konsumen. Tidak jarang, properti yang ditawarkan pihak *developer* masih berstatus non-fisik atau berupa hamparan kapling-kapling tanah. Pembangunan unit baru akan mulai berjalan manakala terdapat konsumen yang memesan serta melunasi pembayaran uang muka (*DP*). Konsep komersial tersebut populer dengan istilah *pre-*

project selling, di mana pengembang memasarkan produk propertinya mendahului penyelesaian konstruksi fisik bangunan.

Menelaah kasus pembatalan pengadaan perumahan pada PT. Restu Property, prinsip normatif yang terkandung dalam Pasal 1266 KUHPerdata menegaskan bahwa “suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya”. Dengan rumusan lain, klausula pembatalan secara otomatis melekat pada setiap format perikatan timbal balik, sekiranya terdapat salah satu pihak yang mencederai janji atau gagal menunaikan kewajiban kontraktualnya.

Kerangka metodologi karya ilmiah ini mengandalkan jenis penelitian hukum empiris melalui pemanfaatan kacamata pendekatan kualitatif. Segala informasi utama yang dikumpulkan bersumber dari data primer, yang digali langsung lewat sesi interviu bersama responden penelitian, meliputi kalangan pembeli rumah PT Restu Property serta jajaran pengelola pihak penjual.

Persamaan mendasar antara jurnal pembanding dan skripsi ini tampak pada isu sentral penulisan yang sama-sama menyoroti tindakan pemutusan transaksi secara sepihak oleh pelanggan, dan juga keduanya berbagi landasan metodologi yang identik melalui penerapan pendekatan kualitatif berjenis empiris.

Adapun pembeda utamanya tampak pada aspek objek riset yang dikaji, dimana jurnal acuan milik Rama Prawira bersama Wayan Novy Purwanto berfokus pada sektor perumahan komersial PT Restu Property, sementara riset ini mengarahkan pengamatannya pada objek spanduk hasil produksi Percetakan Mitra Jaya Lestari.

3. **Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah).**

   Skripsi ditulis oleh: Arleani Firizki Rimanadi

   Universitas Islam Negeri (UIN)

   Esensi awal penulisan riset ini terinspirasi oleh popularitas platform *e-commerce* Shopee di Indonesia yang menawarkan aneka fitur pendukung aktivitas perniagaan digital. Di antara sekian banyak fasilitas yang tersedia, metode *Cash on Delivery* (COD) menduduki tren penggunaan yang tinggi. Sistem transaksi ini mewajibkan pembeli melunasi tagihan secara tunai kepada kurir pada detik-detik paket pesanan tiba di lokasi alamat penerima.

   Tingginya frekuensi pemanfaatan sistem *Cash on Delivery* (COD) tidak terlepas dari persepsi kemudahan yang ditawarkannya, di mana pembeli dapat menuntaskan pembayaran tepat setelah paket berada di tangan mereka. Di samping itu, fasilitas tersebut berfungsi sebagai alternatif bagi kalangan masyarakat yang tidak memiliki instrumen

pembayaran perbankan digital ataupun kartu kredit untuk bertransaksi secara daring.

Pada realitas operasionalnya, permasalahan klasik yang sering bermunculan adalah tindakan pemutusan transaksi secara sepihak oleh pihak pembeli. Tidak jarang konsumen secara sepihak menolak menunaikan kewajiban pembayaran tatkala paket pesanan dibawa oleh kurir. Berbagai latar belakang mendasari timbulnya pembatalan ini, diperparah dengan minimnya iktikad baik dari konsumen untuk menyampaikan kejelasan maupun konfirmasi alasan pembatalan yang mereka lakukan. Situasi semacam ini tentu menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel bagi pihak pelaku usaha. Ketidakmampuan atau keengganan pembeli dalam memenuhi janji transaksi memicu terjadinya pelanggaran atas ikatan kesepakatan yang telah disepakati semenjak awal pemesanan dilakukan.

Pendekatan riset yang ditempuh dalam karya ilmiah ini bertumpu pada jenis penelitian hukum normatif-empiris sebagai bentuk integrasi antara kajian doktrinal dan faktual. Seluruh instrumen data utama yang dihimpun bersumber dari data primer, yang diperoleh lewat rangkaian proses wawancara langsung bersama narasumber di lapangan.

Persamaan dari skripsi tersebut dan penulis ini bermuara pada isu pokok yang dibahas, yakni tindakan pemutusan sepihak oleh pelanggan, di samping kesamaan penerapan kerangka pendekatan kualitatif beserta metode empirisnya.

Sedangkan pembeda utama di antara kedua karya ilmiah ini tampak pada aspek objek riset yang dikaji. Skripsi acuan milik Arleani Firizki Rimanadi mengambil fokus pada aktivitas belanja daring di aplikasi Shopee, sementara riset ini mengarahkan pengamatannya pada objek spanduk hasil produksi Percetakan Mitra Jaya Lestari..

4. **Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Hukum Islam**

   Skripsi ditulis oleh: Ira Rofiah LSB

   STAIN MADINA

   Inisiasi penulisan karya ilmiah ini berakar dari keberadaan *Suru-suru All Delivery*, sebuah pelayanan publik di sektor jasa pesan antar (*delivery*), baik layanan antar makanan dan transportasi ojek yang berkedudukan di kawasan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, serta telah merintis kegiatan operasionalnya sejak 2018 silam. *Suru-suru All Delivery* telah bermitra secara otomatis dengan berbagai pedagang lokal di Panyabungan, yang secara signifikan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses serta menjalankan aktivitas perniagaan sehari-hari, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan belanja.

   Praktik perdagangan elektronik secara kodrati rentan melahirkan berbagai persoalan hukum antara pihak penjual dan pembeli karena sifat transaksinya yang nir-tatap muka (*maya*). Meskipun demikian, kendala jarak dan batasan komunikasi tersebut kini teratasi berkat

hadirnya mekanisme *Cash on Delivery* (COD) yang memungkinkan terjadinya perjumpaan langsung antara subjek hukum yang bertransaksi, dengan catatan lokasi penjual dan pembeli berada di dalam satu wilayah yang terjangkau.

Realitas di lapangan kerap diwarnai oleh pembatalan pesanan secara tiba-tiba oleh pelanggan. Situasi ini memicu kerugian ganda, di mana makanan yang dipesan mangkrak tanpa pembayaran dari konsumen, sementara mitra pengemudi harus menanggung kerugian waktu dan tenaga karena hak upah atas jasa pengantaran yang dijalankan tidak terbayarkan. Selain itu setiap makanan atau minuman yang telah dibeli tidak akan bisa dikembalikan. Perilaku konsumen yang secara sepihak membatalkan pesanan jelas memberikan dampak merugikan yang signifikan bagi mitra pengemudi, meliputi terkurasnya tenaga, kerugian secara finansial, serta hilangnya alokasi waktu secara sia-sia.

Pendekatan riset yang ditempuh dalam karya ilmiah ini bertumpu pada jenis penelitian hukum normatif-empiris sebagai bentuk integrasi antara kajian doktrinal dan faktual. Seluruh instrumen data utama yang dihimpun bersumber dari data primer, yang diperoleh lewat rangkaian proses wawancara langsung bersama narasumber di lapangan.

Persamaan dari skripsi tersebut dan penulis ini bermuara pada isu pokok yang dibahas, yakni tindakan pemutusan sepihak oleh

pelanggan, di samping kesamaan penerapan kerangka pendekatan kualitatif beserta metode empirisnya.

Sedangkan perbedaan yang tampak diantara keduanya teletak pada objek penelitian yang berbeda, yaitu skripsi milik Ira Rofiah LSB meneliti objek berupa pemesanan makanan secara online di aplikasi *e-commerce Suru-suru All Delivery*, sedangkan penulis meneliti objek berupa spanduk dari Percetakan Mitra Jaya Lestari.

F. Hipotesis

Mengacu pada pemaparan masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan hipotesis yang berfungsi sebagai estimasi jawaban pendahuluan, yang nantinya wajib dibuktikan validitasnya secara objektif melalui proses penelitian. Adapunrumusan hipotesis yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut: **"Bahwa akibat hukum bagi pemesan spanduk yang telah membatalkan secara sepihak pesanannya terhadap Percetakan Mitra Jaya Lestari adalah pihak pemesan dari Gerai Laundry tetap dibebani dengan biaya spanduk yang telah selesai di cetak dan hangusnya uang muka untuk mengganti kerugian yang telah dialami pihak percetakan dikarenakan spanduk yang di pesan sudah selesai di cetak".**